

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang marak terjadi bahkan di dunia pendidikan. Maka dari itu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menerbitkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual guna mencegah dan melindungi seluruh sivitas akademi dari kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji urgensi pembentukan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 khususnya melalui perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, serta peran dan tanggung jawab perguruan tinggi dalam keikutsertaannya mengatasi kekerasan seksual di perguruan tinggi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan filosofis (*philosophical approach*) serta pendekatan sosiologis. Penelitian ini menunjukkan bahwa Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 memiliki cacat formil yang tidak sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana terdapat materi muatan pidana materiil yang seharusnya tidak boleh diatur oleh Peraturan Menteri.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

ABSTRACT

Sexual violence is a criminal act that is rampant even in the world of education. Therefore, the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (Kemendikbudristek) issued Permendikbudristek Number 30 of 2021 about Prevention and Handling of Sexual Violence in order to prevent and protect all academicians from sexual violence. This study aims to find out and examine the urgency of the establishment of Permendikbudristek Number 30 of 2021, especially through the perspective of the formation of laws and regulations, as well as the role and responsibility of universities in their participation in overcoming sexual violence in universities. The research was conducted using normative juridical methods through a statute approach, a philosophical approach and a sociological approach. This research shows that Permendikbudristek Number 30 of 2021 has formal defects that are not in accordance with the formation of laws and regulations, which contains material criminal content that should not be regulated by a Ministerial Regulation.

Keywords : Sexual Violence, Formations of Laws and Regulations